JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)
Volume 2 Nomor 6, Desember 2021, Hal. 371-384

e- ISSN : 2797-0086
p-ISSN : 2797-0434

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, HASIL PEMERIKSAAN AUDIT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

Safira Amalia[a*], Nurlina[b], Iqlima Azhar[c]
[a,b,c] *Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra*
[*]*Email : safiraamalia994@gmail.com*

ABSTRAK

This study aims to determine the characteristics of local government, audit results and local revenue on the financial performance of the local government of Langsa City. The population and research sample are the financial statements of Langsa City for the years 2006-2020 contained in the Langsa City BPKD. The results of this study partially show that the characteristics of local governments have a significant value of 0.739 > 0.05. The results show that there is no significant effect on the financial performance of local governments. The results of the audit have a significant value of 0.367 > 0.05. The results show that there is no significant effect on the government's financial performance. region, and local revenue has a significant value of 0.058 > 0.05. The results show that it has no significant effect on the financial performance of local governments. Simultaneous research results show that the characteristics of local government, audit results, and local revenue have an effect of 40.8% on the financial performance of local governments.
Keywords: local government characteristics, audit results, local revenue, local government financial performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaana audit dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota langsa. populasi dan sampel penelitian yaitu laporan keuangan kota langsa tahun 2006-2020 yang terdapat di BPKD Kota Langsa. hasil penelitian ini secara parsial bahwa karakteristik pemerintah daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,739 > 0,05 hasil menunjukkan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja kauangan pemerintah daerah , hasil pemeriksaan audit memiliki nilai signifikan sebsar 0,367 > 0,05 hasil menunjukkan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,058 > 0,05 hasil menunjukkan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. hasil penelitian secara simultan bahwa karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit, dan pendapatan asli daerah berpengaruh sebesar 40,8% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah yang berada diwilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peranan dari pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan yang luas untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

yang menjadi poin penting tersebut, maka analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam pelayanan publik di daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada peraturan pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan keputusan. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintah sehingga tercipta tata kelolah pemerintah yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Halachmi, 2005).

Kota Langsa merupakan salah satu kabupaten/kota yang terletak di provinsi aceh. Kota Langsa merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001. Setelah proses pemekaran, maka kota langsa diharapkan mampu mengatur keuangan daerahnya. Pada tabel 1 dapat dilihat data target dan realisasi pendapatan asli daerah kota langsa tahun 2011 sampai 2020 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa Periode Tahun 2011 sampai dengan 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2011	459.849.149.582,98	21.612.910.030,40	47,00
2	2012	18.703.784.609,909	16.666.942.465,89	89,11
3	2013	64.236.271.011,87	57.117.127.234,61	88,92
4	2014	105.021.343.076,35	114.168.702.058,30	108,71
5	2015	116.650.390.981,79	106.116.860.676,13	90,97
6	2016	113.417.024.706,77	121.369.467.375,72	90,97
7	2017	127.319.792.319,7	120.138.956.032,87	94,36
8	2018	125.638.684.060,62	121.316.713.328,93	96,56
9	2019	145.639.133.970,04	115.244.246.710,49	79,13
10	2020	159.582.797.890,43	126.277.867.970,70	79,13

Sumber : BPKD Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa perkembangan target rekapitulasi pendapatan pemerintah Kota Langsa terhadap pendapatan asli daerah terus mengalami fluktuasi, hal ini di sebabkan pendapatan daerah yang dimasukkan untuk kebutuhan daerah mengalami perubahan setiap tahunnya, tampak bahwa rekapitulasi PAD yang diperoleh pada tahun 2011 mencapai 47,00% sedangkan pada tahun 2012 terjadi penaikan realisasi menjadi 89,11%, penaikan ditahun 2012 tidak terlepas dari adanya mutasi jabatan pada posisi pimpinan

baik untyk kepala bidang dan masing-masing kepala seksi sehingga hal ini menjadi faktor yang berpengaruh terhadap realisasi dari target yang telah di tetapkan pada tahun sebelumnya. realisasi mengalami kenaikan kembali melebihi pencapaian tahun 2012 menjadi 88,92% di tahun 2013 kemudian realisasi mengalami kenaikan melebihi tahun 2013 sebesar 108,71% ditahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan realisasi menjadi 90,97% dan di tahun 2016 realisasi PAD tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan realisasi tetap pada tahun sebelumnya yaitu 90,97%, sedangkan pada tahun 2017 realisasi mengalami kenaikan kembali melebihi pencapaian tahun 2016 yaitu sebesar 94,36%, kemudian pada tahun 2018 realisasi kembali mengalami kenaikan sebesar 96,56% dan pada tahun 2019 sampai 2020 realisasi tidak mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan menjadi 79,13%.

Secara umum dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, realisasi yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan di tahun 2012, 2017 dan tahun 2019 tidak terlepas dari adanya mutasi jabatan pada posisi pimpinan baik untuk Kepala Bidang dan masing-masing Kepala Seksi, sehingga hal ini dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap realisasi dari target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam perekonomian, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah, Kondisi perekonomian negara sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah negara bersangkutan, terutama kebijakan fiskal, yang berkaitan dengan belanja dan pajak negara, serta kebijakan moneter, yang dilakukan dengan tujuan memelihara nilai mata uang suatu negara. Kebijakan pemerintah kemudian akan berpengaruh pada naik turunnya harga-harga di pasar. Misalnya, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, maka harga sembako pun ikut naik karena biaya distribusi barang semakin tinggi.
2. Ekspektasi Berlebihan akan Masa Depan, Ekspektasi dan keuangan adalah dua hal yang sangat berkaitan, serta dapat menyebabkan fluktuasi. Karena adanya ekspektasi tentang suatu hal di masa depan, maka pemerintah membuat kebijakan tertentu dengan harapan ekspektasi tersebut dapat terwujud. Namun jika realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, maka saat itulah terjadi ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan fluktuasi.
3. Perdagangan Internasional, Perdagangan atau transaksi internasional menjadi alasan mengapa pengaruh fluktuasi ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai contohnya, kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh berbagai negara kini semakin gencar. Oleh karena itu, naik turunnya harga barang di pasar internasional juga berimbas kepada kondisi perekonomian Indonesia.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori agensi

Teori agensi merupakan teori yang mempelajari hubungan atau keterkaitan pihak-pihak yang memiliki jalinan hubungan fungsional dan structural, yaitu antara atasan (principal) dan bawahan (agent). Pertama kali diperkenalkan dalam literatur ekonomi informasi untuk menjelaskan sebuah model teoritikal atas hubungan antara satu pihak (principal) yang mendelegasikan suatu pekerjaan kepada pihak lain (agent). Hal yang banyak

terjadi dalam teori agensi dimana agent lebih memahami perusahaan sehingga menimbulkan informasi asimetri yang menyebabkan principal tak mampu menentukan apakah usaha yang dilakukan agent benar-benar optimal (Ikhsan dan Ishak, 2005: 56).

Kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggung jawaban. Menurut Fahmi (2012: 2) yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengertian Kinerja Keuangan menurut Jumingan (2006: 239) merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang sudah dicapai sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sesuai dengan program yang telah ditentukan dan direncanakan.

Karakteristik pemerintah daerah

Karakteristik Pemda Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri-ciri khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Miranti (2009) dalam Sumarjo (2010) pada sektor swasta mendefinisikan karakteristik perusahaan sebagai ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan dan membedakannya dengan perusahaan lain. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Hasibuan (2009) dalam Sumarjo (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diterapkan pada sektor publik, dimana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Poerwadarminta, 2006). Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil Pemeriksaan Audit

Proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Pramono, 2008). Menurut Hall (2007) audit adalah bentuk dari pembuktian indepeden yang dilakukan oleh ahli-auditor-yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Audit dilakukan oleh auditor internal dan

eksternal. Audit eksternal seringkali disebut sebagai audit independen" karena dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang independen dari manajemen perusahaan klienya. Auditor eksternal mewakili berbagai kepentingan pemegang kepentingan pihak ke tiga atas perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor dan badan pemerintah (Hall, 2007). Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2007: 96), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pemerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2008 :25). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku di mana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Desain Model Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

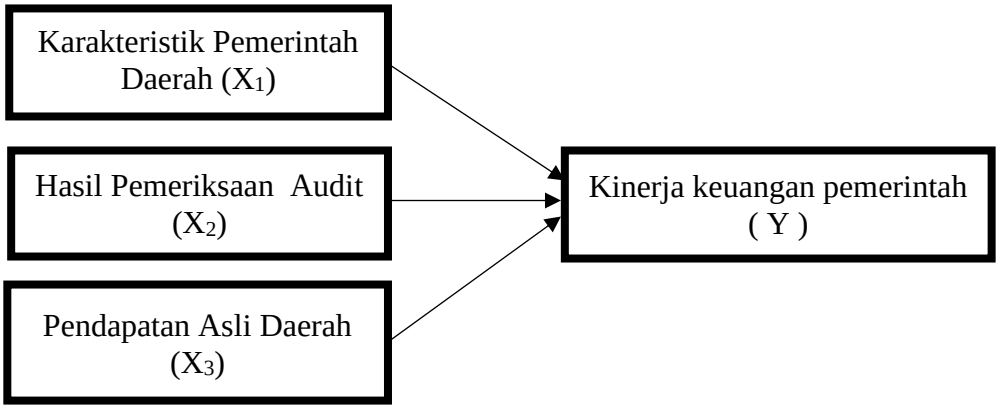

Gambar 1. Model Penelitian

HIPOTESIS

Adapun Hipotesis peneltiian ini adalah sebagai berikut :

H1: Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Signifikan Terhdap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa.

H2: Hasil Pemeriksaan Audit Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa

H3: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keungan Pemerintah Kota Langsa.

H4: Karakteristik Pemerintah Daerah, Hasil Pemeriksaan Audit Dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (sugiyono, 2010). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011 sampai dengan 2020. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) Kota Langsa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis regresi yang digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat/dependen variabel dengan satu atau lebih variabel bebas/independen variabel (Gozali, 2013).

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,655	,285		2,298	,142
	KPD	6,692	,604	,962	11,075	,739
	HPA	,161	,332	,043	,485	,637
	PAD	,194	,091	-,167	2,120	,058

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber output spss 2021

Berikut ini persamaan dari pengujian hipotesis, yaitu :

$$\mathbf{Y= 0{,}655 + 6{,}692\ X_1 - 0{,}161\ X_2 - 0{,}194\ X_3}$$

Berdasarkan regresi linier berganda tabel 4.10, maka dapat diinterpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 0,655 artinya ini menunjukkan jika variable karakteristik pemerintah daerah (KPD), dan hasil pemeriksaan audit (HPA) sama dengan nol maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,655.
2. Koefisien Regresi Variabel karakteristik pemerintah daerah sebesar 6,692 artinya setiap peningkatan karakteristik pemerintah daerah sebesar satu satuan, maka akan menaikkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 6,692 satuan dengan asumsi veriabel bebas lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien Regresi Variabel hasil pemeriksaan audit sebesar 0,161 artinya setiap peningkatan hasil pemeriksaan audit sebesar satu satuan, maka akan menaikkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,161 satuan dengan asumsi veriabel bebas lainnya bernilai tetap.
4. Koefisien Regresi Variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,194 artinya setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar satu satuan, maka akan menurunkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,194 satuan dengan asumsi veriabel bebas lainnya bernilai tetap.

Hasil Uji t

Pada uji parsial yang terdapat pada tabel 4.11 maka dapat dijelaskan keterangannya sebagai berikut:

1. Variabel Karakteristik Pemerintah Daerah (KPD) memiliki nilai signifikan sebesar 0,739 yang berarti diatas 0,05 (tsig > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah (KPD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Variabel hasil pemeriksaan audit (HPA) memiliki nilai signifikan sebesar 0,637 yang berarti diatas 0,05 (tsig > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan audit (HPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai signifikan sebesar 0,058 yang berarti diatas 0,05 (tsig > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah (KPD) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD), dan bahwa hasil pemeriksaan audit (HPA) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD), dan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD).

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Penguji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38,767	3	12,922	42,131	,000[b]
	Residual	3,373	11	,307		
	Total	42,413	14			

a. Dependent Variable: KKPD

b. Predictors: (Constant), PAD, KPD, HPA

Sumber output spss 2021

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai F 28,956 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 (Fsig < 0,05) maka H0 di tolak, artinya semua variable independen berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variable dependen, sehingga variable X_1 X_2 X_3 berpengaruh simultan terdapat variable Y.

Hasil Koefisien Determinan (R2)

Tabel 4. Koefisien Determinan (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,667a	,435	,408	,66274

a. Predictors: (Constant), PAD, KPD, HPA

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber ouput spss 2021

Pada tabel 4. berdasarkan Adjusted R Square sebesar 0,408 hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian yaitu karakteristik pemerintah daerah , hasil pemeriksaan audit dan pendapatan asli daerah pengaruh sebesar 40,8% terhadap kinereja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 52,2% adalah sisanya yang di jelaskan di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variable dependen dan karakteristik pemerintah daerah sebegai variable independen. Hasil dari Uji Parsial melalui Uji t menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang merupakan salah satu variabel independen mempunyai nilai signifikan sebesar 0,739 yang berarti diatas 0,05 (t_{sig} > 0,05), Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhap kinerja keuangan pemerintah daerahs, sehingga dalam penelitian ini H1 ditolak.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan ukuran suatu daerah yang dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Langsa belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu belum memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional dan belum memberikan pelayanan publik yang memadai. Seharusnya pemerintah daerah lebih mengutamakan aset yang bernilai produktif misalnya aset tanah lebih digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan kepada masyarakat dan dapat meningkatakan pendapatan Daerah. Hasil ini tidak mendukung penelitian Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Hasil Pemeriksaan Audit Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari Uji Parsial melalui Uji t menunjukkan bahwa variabel hasil pemeriksaan audit (HPA) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,637 yang berarti diatas 0,05 (t_{sig} > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel hasil pemeriksaan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. yang berarti hipotesis kedua ditolak.

hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan juga diperlukan untuk menghindari berbagai macam tindakan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh audit BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang harus dilaporkan segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menemukan opini yaitu: wajar tanpa pengecualin(WTP), wajar dengan pengecualin (WDP), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tertentu ini ialah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh antara hasil pemeriksaan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penyebab tidak adanya korelasi ini disebabkan karena dalam pemberian hasil pemeriksaan audit yang di

periksa oleh auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal, pemeriksaan akun-akun, dan catatan akuntansi. Tujuan pemeriksaan tersebut berguna untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan (fraud) dalam pencatatan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan bukan berdasarkan jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut. Penelitian ini juga mendukung penelitian dari tama, ary anggara (2018) bahwa Hasil Pemeriksaan Audit Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Bepengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari Uji Parsial melalui Uji t menunjukkan bahwa variabelpendapatan asli daerah (PAD) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,058 yang berarti diatas 0,05 (t_{sig} > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. yang berarti hipotesis ketiga ditolak.

Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka tidak akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak PBB dan Bea Perolehan BPHTP. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah tidak dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian tidak mendukung penelitian dari Devi, Vivi Sri, (2019) tentang Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuang Pemerintah Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi pada Kota Langsa untuk menekankan hasil PAD yang berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang

Karakteristik Pemerintah Daerah, Hasil Pemeriksaan Audit dan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada uji F maka dapat diketahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. karakteristik pemerintah daerah sebegai variable independen. Hasil dari Uji Parsial melalui Uji F menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,000 berarti dibawah 0,05 (t_{sig} > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang meliputi Karakteristik Pemerintah Daerah, Hasil Pemeriksaan Audit Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Kauangan Pemerintah Daerah Pada Kota Langsa, yang berarti hipotesis keempat semua diterima

Salah satu Karakteristik Pemerintah Daerah menunjukkan seberapa besar peran pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah tersebut (Suhardjanto et al., 2010). karakeristik pemerintah daerah menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Syafitri, 2012). Berdasarkan penelitian Sumarjo (2010) peneliti menggunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur pemerintah daerah. pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah dari transfer pemerintah pusat (Sumarjo, 2010). Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah kota langsa ini.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diperoleh kesimpulan pada penelitian ini karakteristik pemerintah daerah, Hasil pemeriksaan audit, dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun secara simultan.

Karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut di karenakan Pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan (PAD) yang besar seharusnya mampu memberikan kinerja yang baik. Jika pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar namun kinerja efisiensinya dinilai masih buruk maka pemerintah daerah tersebut harus instropeksi dan melakukan perbaikan ke depannya. Karena logikanya pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar pasti memiliki tekanan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk lebih baik dalam mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya itu guna perbaikan kinerja.

Hasil pemeriksaan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut di karenakan temuan audit menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih mawas diri dalam mengelola keuangan daerahnya karena buruknya kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan mempengaruhi akan kinerja keuangan daerah. Sedangkan opini audit belum cukup untuk menjelaskan keterkaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit suatu pemerintah daerah yang baik belum tentu menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut akan baik pula. Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Penyebab tidak adanya korelasi ini disebabkan karena dalam pemberian opini audit, BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal, pemeriksaan akun-akun, dan catatan akuntansi.

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula

tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak PBB dan Bea Perolehan BPHTP. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut.

Karakteristik Pemerintah Daerah, Hasil Pemeriksaan Audit Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini di karenakan Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemerintah daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anzarsari, Desy, 2014, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah), Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,

Devi, Vivi Sri, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Tranfer Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang

Dewi, Fevi Prastika, 2019, Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Di Kota Langsa, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Langsa, Aceh.

Hatimah, Khusnul, 2016, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.

Kusuma, Aulia Rizka, 2017, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efesiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, **Jurnal Ilmu Dan Rise Akuntansi, Vol 6, No 1: 404-420.**

Marfiana, Nandhya, Lulus Kurniasih, 2016, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Hasil Pemeriksaan Audit (Bpk) Terhadap kinerja Keuanga pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota, Skripsi, Program Study Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

Martania, Ristin, 2019, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Skripsi, Universitas Muhammaddiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Palembang

Nugroho, Tatas Ridho Nugroho, Eko Novri Prasetyo, 2018, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur, **Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, Vol 7, No 1, 27-34**

Pintasari, Dayanara, 2015, Pengaruh Kompetensi Auditor, Akuntabilitas Dan Bukti Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kap Di Yogyakarta, Skripsi, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negri Yogyakarta, Yogyakarta

Pratiwi, Tri Yuni, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1012 2016,Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta, Yogyakarta

Rizal, Yani, 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Langsa, **Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol 8, No 1.**

Rizal, Yani, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Langsa, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol 3, No 1.Asnidar, Hardi Novia Sitia, Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa, **Jurnal Samudra Ekonomika, Vol 3, No 1**

Saputri, Sealys Harie, 2020, Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, **Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol 9, No 1, 1-21**

Sari, Indah Puspita, 2016, Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuanga Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra), **Jom Feko Vol.3 No.1; 679-692**

Sudarsana, Hafidh Susila, 2013, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap kinerja Pemerintah Daerah, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, Semarang

Suhardjanto, Djoko, Rena Rukmita Yulianingtiyas, 2011, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, **Jurnal Akuntansi Dan Auditing. Vol 8 NO 24, 31 - 43.**

Sumarjo, Hendro, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi, Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suprianto, Dedi, 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya, Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.

Tama, Ary Anggara, 2018, Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, UkuranPemerintah, Dan Temuan Audit Terhadap kinerja Keuangan Daerah, **Jurnal Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Vol 1, No 1,91 - 113.**

Utami, Shafira Ramadhia, Sulardi, 2019, Pengaruh Karakteristikpemerintah Daerah, Opini Audit, Dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, **Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol 19 No 2, 253-263.**

Waliyyani, Ghanniyu Mintotik, Amir Mahmud, 2015, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di

Indonesia, **Jurnal Analisis Akuntansi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Semarang, Semarang, 1-8.**